



Proses Penentuan Kebutuhan Prasarana Gedung di SMA Negeri 1 Lembak

Ria Purnama Sari, Kris Setyaningsih, Sri Eva Mislawaty

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
riapurnama061204@gmail.com, krissetyaningsih_uin@radenfatah.ac.id, srieva_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penentuan kebutuhan prasarana gedung di SMA Negeri 1 Lembak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, kepala sarana dan prasarana, serta guru. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperiksa melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penentuan kebutuhan prasarana gedung di SMA Negeri 1 Lembak berlangsung melalui lima tahapan utama, yaitu identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, penentuan prioritas, penyusunan rencana kebutuhan, dan penetapan kebutuhan gedung. Setiap tahap mempertimbangkan kondisi fisik gedung, jumlah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan pembelajaran, tingkat kerusakan, skala prioritas, serta kemampuan anggaran. Faktor pendukung meliputi dukungan kepala sekolah, kerja sama pengelola sarana dan prasarana dengan pihak sekolah, tersedianya data kondisi gedung, serta dukungan anggaran atau bantuan pemerintah. Adapun hambatan meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan lahan, kerusakan gedung yang membutuhkan biaya besar, dan keterlambatan realisasi kebutuhan. Solusi yang dilakukan adalah menetapkan kebutuhan berdasarkan prioritas, menyesuaikan rencana dengan kemampuan anggaran, mengoptimalkan lahan dan fasilitas yang tersedia, mengusulkan bantuan pemerintah, serta melaksanakan pemenuhan kebutuhan secara bertahap.

Kata kunci: Proses Penentuan Kebutuhan, Prasarana Gedung, Manajemen Sarana dan Prasarana, Perencanaan Sekolah

Abstract

This study aims to analyze the process of determining building infrastructure needs at SMA Negeri 1 Lembak and to identify supporting and inhibiting factors in the process. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through non-participant observation, interviews, and documentation. The informants consisted of the principal, the head of facilities and infrastructure, and teachers. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was examined through triangulation. The findings show that the process of determining building infrastructure needs is carried out through five main stages: needs identification, needs analysis, priority setting, needs planning, and determination of building needs. Each stage considers the physical condition of buildings, the number and utilization of rooms, learning needs, the level of damage, priority scale, and budget capacity. Supporting factors include principal support, cooperation between school stakeholders and facilities management, availability of building-condition data, and budget or government assistance. Inhibiting factors include limited budgets, limited school land, building damage requiring substantial costs, and delays in realizing identified needs. The solutions include prioritizing needs, adjusting plans to budget capacity, optimizing available land and facilities, proposing government assistance, and implementing infrastructure fulfillment gradually.

Keywords: Needs Assessment Process, Building Infrastructure, Facilities and Infrastructure Management, School Planning

1. Pendahuluan

Prasarana pendidikan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran karena keberadaan ruang, gedung, laboratorium, perpustakaan, lapangan, dan fasilitas pendukung lainnya menentukan apakah kegiatan sekolah dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan efektif. Pengelolaan prasarana tidak hanya berkaitan dengan pengadaan, tetapi dimulai dari kemampuan sekolah mengenali kebutuhan, menganalisis kondisi yang tersedia, menentukan prioritas, menyusun rencana, dan menetapkan kebutuhan sesuai sumber daya yang dimiliki. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang baik berkaitan dengan mutu pembelajaran dan kualitas lingkungan belajar (Putri, 2023; Kartini et al., 2023).

Pada jenjang sekolah menengah, kebutuhan prasarana semakin kompleks karena sekolah harus menyesuaikan jumlah dan jenis ruang dengan jumlah peserta didik, program pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, standar pemerintah, serta perkembangan kebutuhan sekolah. Perencanaan yang tidak didasarkan pada data berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata dan fasilitas yang disediakan. Penelitian Astuti et al. (2024) menunjukkan bahwa perencanaan sarana dan prasarana perlu diawali analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas dengan mempertimbangkan anggaran. Temuan serupa terlihat dalam penelitian Mesiono et al. (2024) yang menempatkan analisis kebutuhan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran sebagai unsur penting dalam perencanaan prasarana sekolah.

SMA Negeri 1 Lembak merupakan sekolah menengah negeri yang memiliki kebutuhan prasarana yang beragam. Berdasarkan hasil observasi penelitian, sekolah masih menghadapi keterbatasan pada fasilitas lapangan dan ruang khusus kegiatan ekstrakurikuler. Keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler harus menyesuaikan penggunaan ruang yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penentuan kebutuhan tidak cukup dilakukan berdasarkan keinginan penambahan fasilitas, tetapi perlu didasarkan pada kondisi nyata, pemanfaatan ruang, jumlah peserta didik, kebutuhan pembelajaran, tingkat kerusakan, dan kemampuan pembiayaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya membahas manajemen sarana dan prasarana dari perspektif perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan mutu pendidikan. Putri (2023) menekankan pentingnya manajemen sarana dan prasarana untuk mendukung mutu pembelajaran, sedangkan Chasovy et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Penelitian Astuti et al. (2024) secara khusus mengkaji perencanaan sarana dan prasarana pada SMA, sementara Mediwinata (2025) membahas pengembangan sarana dan prasarana dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus memetakan proses penentuan kebutuhan prasarana gedung ke dalam tahapan identifikasi, analisis, prioritas, penyusunan rencana, dan penetapan pada konteks SMA Negeri 1 Lembak masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana proses penentuan kebutuhan prasarana gedung dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lembak serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Kebaruan penelitian terletak pada pemetaan proses penentuan kebutuhan secara utuh dari tahap identifikasi hingga penetapan, sekaligus menghubungkan setiap tahap dengan kondisi prasarana, kebutuhan pembelajaran, prioritas, dokumen perencanaan, dan kemampuan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran praktis bagi sekolah dalam menyusun kebutuhan prasarana secara lebih sistematis, realistis, dan berbasis kondisi lapangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 20–26 Juli 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya kebutuhan untuk mengkaji proses penentuan prasarana gedung yang dilakukan oleh sekolah dalam kondisi fasilitas yang beragam dan keterbatasan sumber daya tertentu.

Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah dan kepala sarana dan prasarana sebagai informan kunci karena keduanya terlibat langsung dalam proses identifikasi, analisis, penyusunan, dan penetapan kebutuhan gedung. Guru menjadi informan pendukung karena memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Data juga diperkuat melalui dokumen sekolah dan hasil pengamatan kondisi prasarana.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik gedung, jumlah dan pemanfaatan ruang, serta fasilitas yang digunakan dalam kegiatan sekolah. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai proses penentuan kebutuhan dan faktor yang memengaruhinya. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data mengenai kondisi prasarana, dokumen perencanaan, serta data pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik, dan selanjutnya

ditarik kesimpulan dengan membandingkan temuan antar sumber. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tabel 1. Tahapan Proses Penentuan Kebutuhan Prasarana Gedung

Tahap	Fokus	Pertimbangan utama
Identifikasi	Kondisi dan ketersediaan prasarana	Kondisi fisik, jumlah ruang, pemanfaatan, kebutuhan perbaikan
Analisis	Kesesuaian prasarana dengan kebutuhan	Jumlah peserta didik, pembelajaran, kelayakan, standar
Prioritas	Kebutuhan yang harus didahulukan	Kerusakan, urgensi, manfaat, kesepakatan
Perencanaan	Rencana pemenuhan kebutuhan	Usulan, anggaran, koordinasi, tahapan pelaksanaan
Penetapan	Kebutuhan yang disepakati	Hasil musyawarah, prioritas, kondisi, kemampuan anggaran

3. Hasil dan Pembahasan

Identifikasi Kebutuhan Prasarana Gedung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi merupakan tahap awal yang dilakukan sekolah untuk memperoleh gambaran kondisi prasarana yang tersedia dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kepala sekolah dan kepala sarana dan prasarana melakukan pengecekan terhadap bangunan, jumlah ruang, kondisi fisik, dan pemanfaatan ruang. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu fasilitas cukup dipertahankan, memerlukan perbaikan, rehabilitasi, atau membutuhkan pembangunan baru.

Pendataan tidak hanya diarahkan pada keberadaan ruang, tetapi juga pada kesesuaian jumlah dan pemanfaatannya dengan kebutuhan sekolah. Data penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan lapangan dan ruang khusus kegiatan ekstrakurikuler menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan. Beberapa kegiatan harus menggunakan ruang yang tersedia secara bergantian. Temuan ini memperlihatkan bahwa identifikasi kebutuhan harus mempertimbangkan fungsi prasarana dan aktivitas sekolah, bukan sekadar menghitung jumlah bangunan.

Identifikasi juga mencakup pemeriksaan kelayakan dan kondisi fisik gedung. Sekolah memperhatikan bagian bangunan yang mengalami kerusakan dan mencatat kebutuhan perbaikan. Hasil identifikasi tersebut disampaikan kepada kepala sekolah untuk dibahas lebih lanjut. Pola ini menunjukkan adanya pembagian peran: kepala sarana dan prasarana menyediakan data kondisi lapangan, sedangkan kepala sekolah memberikan arahan dan kebijakan untuk tindak lanjut.

Temuan tersebut sejalan dengan Astuti et al. (2024) yang menempatkan analisis kebutuhan sebagai dasar perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Juwana et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas yang efektif membutuhkan proses pengamatan, pengumpulan informasi, dan pengambilan keputusan yang terencana. Dengan demikian, identifikasi di SMA Negeri 1 Lembak telah menjadi basis awal bagi proses penentuan kebutuhan berikutnya.

Analisis Kebutuhan Prasarana Gedung

Setelah kondisi prasarana teridentifikasi, sekolah melakukan analisis untuk melihat kesesuaian antara fasilitas yang tersedia dengan kebutuhan sekolah. Analisis mempertimbangkan kondisi dan kelayakan gedung, pemanfaatan ruang, jumlah peserta didik, serta kebutuhan kegiatan pembelajaran. Artinya, kebutuhan tidak langsung ditetapkan berdasarkan temuan kerusakan, tetapi dianalisis terlebih dahulu agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata.

Analisis juga dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah ruang dan pemanfaatannya. Sekolah melihat apakah ruang yang tersedia telah mampu mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Kondisi ini penting karena prasarana yang secara fisik tersedia belum tentu secara fungsional mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dalam menentukan apakah diperlukan penambahan, perubahan fungsi, rehabilitasi, atau pembangunan.

Kelayakan gedung dianalisis melalui kondisi fisik dan pemanfaatannya. Bangunan yang masih layak dapat terus digunakan, sedangkan bagian yang membutuhkan penanganan dicatat sebagai kebutuhan perbaikan atau rehabilitasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keputusan kebutuhan prasarana didasarkan pada data kondisi lapangan.

Secara teoritis, hasil ini memperkuat pandangan bahwa perencanaan prasarana perlu diawali analisis kebutuhan dan kesesuaian dengan tujuan pendidikan. Putri (2023) menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana harus diarahkan pada dukungan terhadap mutu pembelajaran. Dalam konteks SMA Negeri 1 Lembak, analisis kebutuhan berfungsi sebagai jembatan antara data kondisi prasarana dan keputusan mengenai fasilitas yang harus dipenuhi.

Penentuan Prioritas Kebutuhan Gedung

Penentuan prioritas dilakukan karena sekolah tidak dapat merealisasikan seluruh kebutuhan dalam waktu yang bersamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, kebutuhan pembelajaran, manfaat prasarana, dan kemampuan anggaran. Kebutuhan yang paling penting dan mendesak ditempatkan sebagai prioritas untuk ditindaklanjuti.

Tingkat kerusakan menjadi pertimbangan utama. Sekolah melakukan pengecekan terhadap bagian gedung yang mengalami kerusakan dan menilai dampaknya terhadap penggunaan ruang. Kerusakan yang lebih berat dan mengganggu kegiatan sekolah menjadi perhatian lebih besar. Selain kondisi fisik, sekolah juga melihat seberapa besar prasarana tersebut dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran.

Penentuan prioritas dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah. Kepala sekolah, kepala sarana dan prasarana, serta guru dapat memberikan informasi dan masukan mengenai kebutuhan yang perlu didahulukan. Dengan demikian, prioritas tidak hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi dibangun melalui pembahasan berdasarkan data kondisi dan kebutuhan.

Temuan tersebut konsisten dengan Mesiono et al. (2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan sarana prasarana sekolah perlu melalui analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas sebelum disesuaikan dengan anggaran. Sari dan Savitri (2025) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya mendorong sekolah menggunakan perencanaan berbasis prioritas dan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Gedung

Penyusunan rencana dilakukan setelah sekolah memperoleh hasil identifikasi, analisis, dan prioritas. Rencana kebutuhan dapat berupa perbaikan, rehabilitasi, maupun pembangunan baru. Rencana disusun secara bertahap dan mengacu pada program kerja sekolah. Setiap usulan dibahas bersama agar dapat disesuaikan dengan kondisi nyata dan kemampuan sekolah.

Dalam penyusunan usulan pembangunan atau rehabilitasi, sekolah menggunakan data kondisi gedung sebagai dasar. Bagian bangunan yang membutuhkan penanganan dicatat, kemudian dibahas untuk menentukan bentuk tindak lanjut. Dengan cara ini, usulan tidak semata-mata berupa daftar keinginan, tetapi merupakan hasil dari proses pengumpulan data dan penilaian kondisi.

Perencanaan anggaran menjadi unsur penting. Tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan dalam satu periode, sehingga sekolah menyusun rencana secara bertahap berdasarkan kemampuan dana. Kebutuhan yang dianggap lebih penting dimasukkan terlebih dahulu, sedangkan kebutuhan lain dapat direncanakan pada tahap berikutnya. Pola ini menunjukkan adanya penyesuaian antara idealitas kebutuhan dan realitas sumber daya.

Koordinasi juga menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana. Kepala sekolah memberikan arahan dan kebijakan, kepala sarana dan prasarana menyampaikan data kondisi fasilitas, sedangkan guru memberikan masukan berdasarkan penggunaan prasarana dalam pembelajaran. Model koordinatif ini sejalan dengan penelitian Mediwinata (2025) yang menempatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan perencanaan berbasis kebutuhan sebagai bagian penting dalam pengembangan fasilitas sekolah.

Penetapan Kebutuhan Gedung

Penetapan merupakan tahap akhir proses penentuan kebutuhan prasarana gedung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dilakukan melalui pembahasan dan musyawarah pihak sekolah dengan mempertimbangkan hasil identifikasi, analisis, prioritas, kondisi gedung, serta kemampuan anggaran. Kebutuhan yang telah disepakati kemudian dicatat dalam dokumen perencanaan sekolah sebagai dasar tindak lanjut.

Penetapan kebutuhan tidak berarti seluruh kebutuhan langsung direalisasikan. Sekolah tetap menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Kebutuhan yang paling mendesak dapat didahulukan, sedangkan kebutuhan yang belum memungkinkan direalisasikan dapat direncanakan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, penetapan berfungsi mengubah hasil analisis menjadi keputusan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen resmi juga memiliki fungsi penting karena menjadi bukti tertulis mengenai kebutuhan yang telah direncanakan atau ditetapkan. Dokumentasi membantu sekolah mengetahui kebutuhan yang sudah diusulkan, kebutuhan yang sedang diproses, dan kebutuhan yang masih menunggu realisasi. Penggunaan data dan dokumen tersebut memperkuat kesinambungan proses perencanaan.

Faktor pendukung

Pertama, dukungan kepala sekolah menjadi faktor penting. Kepala sekolah memberikan arahan, mempertimbangkan kebutuhan yang disampaikan, dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi prasarana, tingkat kebutuhan, serta manfaatnya bagi kegiatan sekolah. Dukungan pimpinan membuat proses penentuan kebutuhan memiliki arah kebijakan yang jelas.

Kedua, kerja sama antara pihak sekolah dan pengelola sarana dan prasarana mendukung kelancaran proses. Kepala sarana dan prasarana melakukan pendataan dan pengecekan kondisi, kepala sekolah membahas serta menentukan tindak lanjut, sedangkan guru memberikan masukan berdasarkan pengalaman menggunakan fasilitas. Ketiga, tersedianya data kondisi gedung membantu sekolah membuat keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Keempat, dukungan anggaran atau bantuan pemerintah dapat mempercepat realisasi kebutuhan yang telah diprioritaskan.

Faktor penghambat

Hambatan pertama adalah keterbatasan anggaran pembangunan gedung. Kebutuhan prasarana tidak selalu dapat dipenuhi secara bersamaan karena pembangunan dan rehabilitasi memerlukan biaya yang besar. Kondisi ini menyebabkan sekolah harus memilih kebutuhan yang paling mendesak dan melakukan pemenuhan secara bertahap.

Hambatan kedua adalah keterbatasan lahan. Penambahan ruang atau pembangunan baru harus disesuaikan dengan lahan yang tersedia sehingga pilihan pengembangan fisik sekolah menjadi terbatas. Hambatan ketiga adalah kondisi gedung yang membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Kerusakan tertentu tidak dapat ditangani sekaligus sehingga membutuhkan tahapan pelaksanaan.

Hambatan berikutnya adalah keterlambatan realisasi kebutuhan. Kebutuhan yang telah diidentifikasi dan diusulkan masih harus melewati proses pengusulan, penyesuaian anggaran, dan penentuan prioritas. Akibatnya, terdapat jeda antara penetapan kebutuhan dan realisasi. Dalam kondisi tersebut, sekolah mengoptimalkan fasilitas yang tersedia sambil menunggu pemenuhan kebutuhan.

Temuan ini sejalan dengan Sari dan Savitri (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan fasilitas dapat diatasi melalui perencanaan berbasis prioritas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan optimalisasi fasilitas yang tersedia. Kajian Juwana et al. (2025) juga menekankan pentingnya pengelolaan strategis agar keputusan pengembangan prasarana tetap terarah ketika sumber daya terbatas.

Tabel 2. Faktor Pendukung, Hambatan, dan Respons Sekolah

Aspek	Temuan	Respons
Pendukung	Dukungan kepala sekolah	Arahan, pembahasan, dan pengambilan keputusan
Pendukung	Kerja sama pengelola sarpras	Pendataan, koordinasi, dan penyusunan usulan
Pendukung	Data kondisi gedung	Menjadi dasar identifikasi dan analisis
Pendukung	Anggaran/bantuan pemerintah	Mempercepat realisasi kebutuhan prioritas
Hambatan	Anggaran terbatas	Prioritas dan pemenuhan bertahap
Hambatan	Lahan terbatas	Optimalisasi lahan dan fasilitas tersedia
Hambatan	Kerusakan berbiaya besar	Perbaikan/rehabilitasi bertahap
Hambatan	Realisasi terlambat	Pengusulan ulang dan penyesuaian prioritas

Proses Penentuan Kebutuhan

Jika kelima tahapan penelitian dilihat sebagai satu rangkaian, proses penentuan kebutuhan prasarana gedung di SMA Negeri 1 Lembak memperlihatkan pola keputusan yang bertahap dan berbasis data. Identifikasi menghasilkan informasi mengenai kondisi dan ketersediaan fasilitas. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian dengan kebutuhan sekolah. Hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas, kemudian diterjemahkan ke dalam rencana kebutuhan dan akhirnya ditetapkan melalui musyawarah. Pola tersebut memperlihatkan bahwa keputusan mengenai prasarana tidak dibuat secara langsung, tetapi melalui proses penyaringan kebutuhan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kemampuan anggaran hadir pada hampir setiap tahap. Pada tahap analisis, anggaran menjadi pertimbangan untuk melihat kemungkinan pemenuhan kebutuhan. Pada tahap prioritas, anggaran membantu menentukan kebutuhan mana yang dapat didahulukan. Pada tahap penyusunan rencana, anggaran menentukan apakah kebutuhan dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap. Sementara pada tahap penetapan, kemampuan anggaran menjadi dasar realistis untuk menentukan kebutuhan yang akan diusulkan dan direalisasikan. Dengan demikian, proses penentuan kebutuhan di sekolah bukan hanya proses teknis, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan sumber daya.

Dari sisi manajemen, keterlibatan beberapa pihak menjadi kekuatan penting. Kepala sekolah berperan memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan, kepala sarana dan prasarana berperan menyediakan informasi teknis mengenai kondisi fasilitas, sedangkan guru memberikan masukan berdasarkan pengalaman penggunaan prasarana. Pembagian peran tersebut membuat informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan lebih beragam. Keterlibatan guru juga membantu sekolah melihat kebutuhan dari perspektif pengguna langsung, khususnya dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas tidak selalu berarti sekolah harus segera membangun fasilitas baru. Sekolah terlebih dahulu menilai kondisi fasilitas yang tersedia dan kemungkinan optimalisasi pemanfaatannya. Pendekatan tersebut tampak pada penggunaan ruang yang tersedia untuk kegiatan tertentu dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan secara bertahap. Dengan demikian, strategi pemenuhan prasarana dapat dibedakan menjadi pemeliharaan fasilitas yang masih layak, rehabilitasi fasilitas yang rusak, optimalisasi penggunaan ruang, dan pembangunan fasilitas baru apabila kebutuhan memang tidak dapat dipenuhi melalui alternatif yang tersedia.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya sekolah memiliki siklus pendataan prasarana yang dilakukan secara berkala. Pendataan tidak cukup hanya dilakukan ketika sekolah akan mengusulkan pembangunan, tetapi perlu menjadi kegiatan rutin agar perubahan kondisi gedung dapat diketahui lebih awal. Data tersebut dapat memuat kondisi fisik, tingkat pemanfaatan, kebutuhan perbaikan, urgensi, serta perkiraan tindak lanjut. Jika data diperbarui secara berkala, sekolah akan lebih mudah menyusun prioritas dan menghindari keterlambatan dalam menangani kerusakan.

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menempatkan analisis kebutuhan dan skala prioritas sebagai dasar perencanaan sarana prasarana (Astuti et al., 2024; Mesiono et al., 2024). Namun, penelitian ini memberikan penekanan lebih khusus pada hubungan antara identifikasi kondisi gedung, penentuan prioritas, dokumen perencanaan, dan kemampuan anggaran dalam satu alur proses pada sekolah menengah negeri. Perspektif tersebut membantu memperlihatkan bahwa keberhasilan pemenuhan prasarana tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana, tetapi juga oleh kualitas proses penentuan kebutuhan sebelum dana digunakan.

Dengan demikian, proses penentuan kebutuhan prasarana gedung dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa sumber daya sekolah diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar penting. Semakin baik data kondisi prasarana dan semakin kuat koordinasi antarpihak, semakin besar peluang sekolah menetapkan kebutuhan secara tepat sasaran. Sebaliknya, ketika data tidak diperbarui, prioritas tidak jelas, atau komunikasi antarpihak kurang optimal, proses pemenuhan kebutuhan berpotensi mengalami keterlambatan dan ketidaktepatan.

Implikasi Temuan terhadap Pengelolaan Prasarana Sekolah

Implikasi pertama berkaitan dengan pentingnya basis data kondisi prasarana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa data mengenai kondisi bangunan, jumlah ruang, dan pemanfaatannya menjadi bahan awal dalam pembahasan kebutuhan. Oleh sebab itu, sekolah perlu menjaga agar data tersebut tetap mutakhir. Pendataan yang dilakukan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi perubahan kondisi gedung, mengetahui kebutuhan rehabilitasi sejak dini, dan menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada perkiraan. Dalam praktiknya, data dapat dikembangkan dalam bentuk daftar kondisi ruang, catatan kerusakan, tingkat urgensi, riwayat perbaikan, serta rencana tindak lanjut.

Implikasi kedua adalah perlunya menghubungkan penentuan kebutuhan dengan perencanaan pembelajaran. Prasarana tidak berdiri sendiri sebagai aset fisik, tetapi berfungsi mendukung kegiatan pendidikan. Karena itu, ketika menentukan kebutuhan ruang atau fasilitas, sekolah perlu mempertimbangkan bagaimana prasarana tersebut digunakan oleh guru dan peserta didik. Misalnya, keterbatasan lapangan bukan hanya persoalan jumlah fasilitas, tetapi berpengaruh terhadap pelaksanaan olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler. Begitu pula keterbatasan ruang khusus dapat menyebabkan kegiatan tertentu harus menggunakan ruang lain secara bergantian. Pertimbangan fungsi tersebut membantu sekolah menentukan kebutuhan secara lebih tepat.

Implikasi ketiga berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis prioritas. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran membuat sekolah tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan dalam waktu yang sama. Karena itu, prioritas menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan pada kebutuhan yang paling mendesak. Prioritas dapat ditentukan melalui kombinasi indikator, seperti tingkat kerusakan, risiko keselamatan, dampak terhadap pembelajaran, jumlah pengguna, urgensi, dan ketersediaan alternatif fasilitas. Dengan indikator yang jelas, keputusan dapat dijelaskan kepada warga sekolah dan menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan.

Implikasi keempat adalah pentingnya koordinasi. Penentuan kebutuhan prasarana melibatkan informasi yang berbeda-beda. Kepala sekolah memiliki perspektif kebijakan dan anggaran, pengelola sarana prasarana memiliki informasi teknis mengenai kondisi bangunan, sedangkan guru mengetahui kebutuhan fasilitas berdasarkan aktivitas pembelajaran. Ketika informasi tersebut digabungkan melalui rapat atau musyawarah, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Koordinasi juga mengurangi risiko adanya kebutuhan yang terlewat karena hanya dilihat dari satu sudut pandang.

Implikasi kelima berkaitan dengan penganggaran bertahap. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan yang telah ditetapkan belum tentu langsung dapat direalisasikan. Sekolah perlu menyesuaikan rencana dengan kemampuan dana dan dapat mengusulkan bantuan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, dokumen rencana kebutuhan menjadi penting karena memungkinkan sekolah mempertahankan kesinambungan program dari satu periode ke periode berikutnya. Kebutuhan yang belum dapat dilaksanakan tidak hilang, tetapi tetap tercatat dan dapat diusulkan kembali ketika sumber daya tersedia.

Implikasi keenam adalah optimalisasi fasilitas yang tersedia. Ketika pembangunan baru belum memungkinkan karena keterbatasan lahan atau anggaran, sekolah dapat melakukan pengaturan penggunaan ruang, penjadwalan kegiatan, pemeliharaan preventif, dan rehabilitasi pada bagian yang paling membutuhkan.

Optimalisasi bukan berarti mengabaikan kebutuhan pembangunan, tetapi menjadi strategi sementara agar kegiatan pendidikan tetap berjalan. Strategi tersebut perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas sementara tidak menimbulkan masalah baru.

Dari sudut pandang mutu pendidikan, pengelolaan prasarana yang terencana dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kegiatan akademik maupun nonakademik. Penelitian Putri (2023), Kartini et al. (2023), dan Iqllima et al. (2024) memperlihatkan bahwa pengelolaan fasilitas yang efektif berhubungan dengan terciptanya lingkungan pembelajaran yang mendukung. Temuan penelitian di SMA Negeri 1 Lembak memperlihatkan bahwa hubungan tersebut dimulai sejak tahap penentuan kebutuhan. Jika kebutuhan ditetapkan secara tepat, peluang pemanfaatan sumber daya secara efektif akan semakin besar.

Hasil penelitian juga memberikan gambaran mengenai posisi kepala sekolah dalam proses penentuan kebutuhan. Kepala sekolah bukan hanya pihak yang mengesahkan kebutuhan, tetapi terlibat dalam memberikan arahan, menilai urgensi, membahas prioritas, dan menyesuaikan rencana dengan kemampuan sekolah. Peran tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan diperlukan untuk menghubungkan kebutuhan teknis dengan kebijakan sekolah. Dalam konteks keterbatasan sumber daya, kepala sekolah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan pembelajaran dan keselamatan warga sekolah.

Sementara itu, kepala sarana dan prasarana berperan penting sebagai penyedia informasi teknis. Pengecekan kondisi bangunan dan pendataan ruang menghasilkan informasi yang menjadi dasar keputusan. Karena itu, kualitas proses penentuan kebutuhan sangat dipengaruhi oleh ketelitian pendataan. Data yang tidak lengkap dapat menyebabkan prioritas tidak tepat, sedangkan data yang diperbarui dapat membantu sekolah memperkirakan kebutuhan perbaikan sebelum kerusakan menjadi lebih berat.

Guru juga memiliki posisi penting sebagai pengguna prasarana. Masukan guru dapat menunjukkan apakah fasilitas yang tersedia benar-benar mendukung kegiatan pembelajaran. Informasi tersebut dapat melengkapi data teknis yang diperoleh pengelola sarana dan prasarana. Dengan melibatkan guru dalam proses pembahasan, sekolah dapat mengetahui kebutuhan berdasarkan pengalaman penggunaan secara langsung. Pola partisipatif tersebut juga membantu membangun rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas sekolah.

Secara keseluruhan, proses yang ditemukan dalam penelitian dapat dipandang sebagai siklus keputusan: kondisi aktual menjadi data, data dianalisis menjadi kebutuhan, kebutuhan disusun menjadi prioritas, prioritas dituangkan dalam rencana, dan rencana ditetapkan sesuai kemampuan sumber daya. Setelah kebutuhan direalisasikan, kondisi fasilitas perlu kembali dipantau agar siklus dapat berjalan pada periode berikutnya. Pola siklus tersebut penting agar pengelolaan prasarana tidak bersifat reaktif, tetapi berkembang menjadi proses perencanaan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan hanya menunjukkan bahwa SMA Negeri 1 Lembak memiliki keterbatasan prasarana, tetapi menjelaskan bagaimana sekolah merespons keterbatasan tersebut melalui mekanisme identifikasi, analisis, prioritas, perencanaan, dan penetapan. Mekanisme tersebut dapat menjadi rujukan praktis bagi sekolah lain yang menghadapi kondisi serupa, terutama sekolah yang harus menyesuaikan kebutuhan fasilitas dengan keterbatasan anggaran dan lahan.

4. Kesimpulan

Proses penentuan kebutuhan prasarana gedung di SMA Negeri 1 Lembak dilaksanakan melalui lima tahapan yang saling berkaitan, yaitu identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan, penentuan prioritas, penyusunan rencana kebutuhan, dan penetapan kebutuhan gedung. Identifikasi dilakukan melalui pengecekan kondisi fisik, jumlah dan pemanfaatan ruang serta kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi. Analisis mempertimbangkan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan sekolah, jumlah peserta didik, kegiatan pembelajaran, dan kelayakan gedung. Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat terhadap pembelajaran, dan kemampuan anggaran. Selanjutnya, rencana disusun melalui koordinasi dan penganggaran secara bertahap, kemudian kebutuhan ditetapkan melalui musyawarah dan dicatat dalam dokumen perencanaan sekolah. Faktor pendukung utama ialah dukungan kepala sekolah, kerja sama pengelola sarana dan prasarana, ketersediaan data kondisi gedung, serta dukungan anggaran atau bantuan pemerintah. Hambatan utama berupa keterbatasan anggaran,

lahan, biaya perbaikan yang besar, dan keterlambatan realisasi. Oleh karena itu, sekolah perlu mempertahankan perencanaan berbasis data, memperkuat pendataan berkala, menggunakan skala prioritas, mengoptimalkan fasilitas yang tersedia, dan mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan secara bertahap.

Reference

1. Anggraeni, L., Gumanti, M., Nurlela, & Astuti, S. (2025). Pengelolaan manajemen sarana prasarana di Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Pringsewu. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 237–246. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18985>
2. Arifin, Z. (2023). Manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu madrasah. *At-Tahsin: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.59106/attahsin.v3i2.138>
3. Astuti, M., Ibrahim, I., & Dary, R. W. (2024). Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 19 Palembang. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan di Bidang Administrasi Pendidikan*, 12(1), 194–204. <https://doi.org/10.33394/vis.v12i1.10731>
4. Chasovy, A., Giatman, M., & Ernawati. (2023). Implementasi manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan. *Journal of Education Research*, 4(2), 662–668. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i2.231>
5. Iqlima, Z. G., Nurjanah, F., & Rustini, T. (2024). Effective management of educational facilities and infrastructure to ensure safe and supportive learning environments. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 12(2). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v12i2.70123>
6. Ikhwan, A., Letiges, F. K. Z., Arifin, S., Muhson, M., & Triyuliasari, A. (2025). Inventory management of educational facilities and infrastructure. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 16–28. <https://doi.org/10.31538/ndhq.v10i1.9>
7. Juwana, I. D. P., Indrawan, I. P. E., & Anggreni, N. L. P. Y. (2025). Strategic management of school facilities and infrastructure: A case study of State Elementary School 11 Sesetan Denpasar. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 11(2), 269–276. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v11i02.11405>
8. Kartini, K., Sobar, A., & Karyaningtyas, K. (2023). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 115–123. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i2.238>
9. Mantri, W. N., N. A., & Wuryandini, E. (2023). Manajemen sarana dan prasarana di SMP Negeri 21 Semarang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 4848–4853. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2356>
10. Mediwinata, A. F. (2025). Management of development of facilities and infrastructure in the implementation of school-based management: Qualitative descriptive analysis of MAN 2 Palembang City. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 20–31. <https://doi.org/10.35706/wkip.v9i01.13108>
11. Mesiono, M., Azmi, F., Farhaini, N., & Harahap, V. A. (2024). Perencanaan sarana dan prasarana di sekolah MAN 2 Model Medan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 4607–4618. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13630>
12. Nome, D., Selan, G. Y., Manu, S., Taneo, R. R., Selan, S. O., & Sole, Y. Y. E. (2026). Manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 2(2), 727–736. <https://doi.org/10.63822/c514m961>
13. Putri, S. N. (2023). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 4(2), 95–104. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v4i2.233>
14. Samosir, B., Sihotang, E. C., Rahmadani, R., Manalu, R. Y., Trihandayani, T., Lubis, W., Budianto, A., & Ikhlas, M. (2025). Pengelolaan fasilitas dan infrastruktur di Sekolah Dasar 101767 Tembung untuk meningkatkan pembelajaran yang optimal. *Journal of Professional Elementary Education*, 4(1). <https://doi.org/10.46306/jpee.v4i1.92>
15. Sari, A. A., & Savitri, R. (2025). Strategi manajerial kepala sekolah dalam pengembangan fasilitas sarana dan prasarana di SMP Swasta Nurul Khoir Kota Jambi. *JMiE: Journal of Management in Education*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.30631/jmie.2025.101.1-8>
16. Setyawati, R., & Ansar, A. (2023). Manajemen sarana prasarana di SMK Negeri 1 Sinjai. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.26858/jak2p.v4i1.19481>
17. Sholehah, M., Kholid, I., Subandi, Ayu, S. M., & Junaidah. (2023). Manajemen sarana prasarana pendidikan di SMP dan SMA IT IMBOS Pringsewu. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 8(1), 33–43. <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i01.274>
18. Suban, A., & colleagues. (2023). Manajemen sarana dan prasarana dalam mengembangkan mutu pendidikan. *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 123–133.
19. Yusri, B. A. (2020). Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 1(1), 44–52.